

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

a. Pengertian SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu rangkaian dalam prosedur pembuatan laporan keuangan untuk keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) artinya diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Menurut IAI (2018) “dengan adanya SAK ETAP diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri, dapat diaudit, dan mendapat opini audit, sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan akan semakin luas”. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa Standar akuntansi yang sudah ada seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP.

SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) Ditunjukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab public signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas Negara. SAK umum sering disebut sebagai standar akuntansi yang rumit untuk dipahami serta diterapkan, dalam hal ini SAK ETAP memberikan kemudahan para entitas

dibandingkan SAK Umum dengan peraturan pelaporan yang cukup kompleks. Sesuai dengan SAK ETAP standar akuntansi ini dimaksudkan untuk digunakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna laporan keuangan seperti para investor dan kreditur

Menurut Agus Arwani (2016) menyatakan pengertian tentang SAK ETAP sebagai berikut :

Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar keuangan yang nantinya akan membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan atau menyajikan pelaporan keuangan yang tetap andal relevan dengan tanpa terjebak dalam kerumitan standar akuntansi berbasis IFRS.

Menurut Saiful Bahri (2016) menyatakan pengertian tentang SAK ETAP sebagai berikut :

SAK ETAP adalah suatu standar yang hadir sebagai solusi bagi para entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan guna tujuan umum bagi para pengguna eksternal seperti kreditur dan lembaga perkreditan.

b. Manfaat SAK ETAP

SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut ini manfaat SAK ETAP menurut beberapa para ahli:

Menurut IAI (2018) dalam bukunya, SAK ETAP memiliki manfaat sebagai berikut :

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai

kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang.

Menurut Dwi Martini (2019) SAK ETAP memiliki beberapa manfaat untuk diterapkan, diantaranya adalah :

- 1) Mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri.
- 2) Dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana dibanding PSAK IFRS.
- 3) Laporan keuangan dapat menjadi dasar opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha.
- 4) Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan bagi para pengguna guna pengambilan keputusan.

c. Karakteristik SAK ETAP

Menurut IAI (2018) SAK ETAP Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.
- 2) Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 3) Materialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi

tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

4) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5) Substansi

Mengungguli Bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6) Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

7) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan

kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9) Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

d. Pengguna SAK ETAP

Menurut IAI (2018) Yang dimaksud Pengguna SAK ETAP

adalah sebagai berikut:

- 1). Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- 2). Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, investor saham, dll. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

e. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut IAI (2018) Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP sebagai berikut :

1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2. Kepatuhan Terhadap Sak Etap

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

3. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif

realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut;
- b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan

5. Penyajian Yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan Kebijakan akuntansi atau SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- a) Sifat reklasifikasi;
- b) Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan,
- c) Alasan reklasifikasi. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:
 - a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan

- b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

6. Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan

7. Materialitas Dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

8. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi; Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
- 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- 4) Laporan arus kas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

9. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;

- b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- c. Mata uang pelaporan,
- d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:
 - 1) Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;
 - 2) Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Yulianti (2018) laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas dari BUMDes dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan salah satu catatan informasi keuangan organisasi dalam satu periode yang dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi financial dari perusahaan dan menilai perkembangan suatu perusahaan yang akan dilaporkan pada akhir periode, yang disertai dengan laporan pertanggungjawaban atas pengolahan suatu badan usaha.

Menurut Irham Fahmi (2018) yang mengemukakan bahwa laporan keuangan sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.

Menurut Hariyani, (2016) yang mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

Laporan keuangan (financial statement) adalah laporan yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang terdiri dari laporan perhitungan laba rugi (income statement), laporan perubahan

modal (capital statement) dan neraca (balance sheet) serta laporan-laporan tambahan seperti laporan arus kas (cash flow).

Menurut Kasmir (2019), yang mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada mulanya berfungsi sebagai alat pengujian pekerjaan fungsi bagian pembukuan dalam perusahaan. Menurut IAI (2018) “fungsi laporan keuangan berkembang menjadi menjadi dasar penentuan penilaian atas posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi para pemakai atau pengguna informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pada pembuatan keputusan ekonomik”. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap laporan keuangan sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Disamping itu tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Menurut IAI (2018) laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

Tujuan laporan keuangan adalah untuk meberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Menurut Kasmir (2019) mengungkapkan tujuan laporan keuangan sebagaia berikut :

- 1) Memberikan informasi yang berisikan tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi yang berisikan tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan.
- 3) Memberikan informasi yang berisikan tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada satu periode.
- 4) Memberikan informasi yang berisikan tentang jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama satu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi yang berisikan tentang perubahan – perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi yang berisikan tentang kinerja suatu perusahaan dalam satu periode.
- 7) Memberikan informasi yang berisikan tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- 8) Informasi keuangan lainnya.

Menurut Irham Fahmi (2018) yang mengemukakan bahwa

Tujuan laporan keuangan sebagai berikut :

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakan laporan tersebut untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya, apakah entitas tersebut berhak melanjutkan investasinya dalam perusahaan atau

menghentikannya. Seandainya nilai uang yang dihasilkan tidak stabil maka akan dijelaskan dalam laporan keuangan perusahaan.

c. **Komponen - Komponen Laporan Keuangan**

Menurut Dwi Martini (2015) menyebutkan ada lima komponen-komponen atau unsur-unsur yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan lainnya.

Menurut Kasmir (2019) menyebutkan ada lima komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai berikut:

a. Neraca

Neraca merupakan informasi mengenai sifat dan jumlah nilai yang menunjukkan posisi keuangan pada periode tertentu . Terdapat elemen-elemen dalam neraca yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktiva, tidak hanya pada kekayaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk dalam pengeluaran-pengeluaran perusahaan serta aktiva yang tidak berwujud lainnya.
- 2) Liabilitas adalah semua kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana liabilitas diartikan sebagai hutang yang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.
- 3) Modal adalah hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang penghasilan, beban, laba maupun rugi bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama satu periode waktu.

c. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut,

pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi, dividend an distributor lainnya.

d. Laporan arus kas

Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi keuangan yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan di harapkan mampu menyaaajikan informasi secara sistematis. Setiap akun dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan suatu perusahaan pada satu periode , yang dilaporkan dalam neraca dan laba rugi, serta laporan arus kas dan laporan perubahan posisi ekuitas. Yang mana dalam neraca tersebut terdiri dari jumlah asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan tersebut . laporan laba rugi yang berisikan hasil dari operasi perusahaan selama satu periode. Laporan peubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas dalam perusaaan tersebut.

d. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Dwi Martani (2015) laporan keuangan memiliki karakteristik sesuai dengan SAK ETAP sebagai berikut :

- 1) Dapat Dipahami
Kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna guna mengambil keputusan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi laporan keuangan.
- 2) Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.
- 3) Materialitas
Informasi dipandang material jika kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
- 4) Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan.

e. Pengguna laporan keuangan

Menurut Irham Fahmi (2018) pengguna laporan keuangan sebagai berikut :

1. Kreditur Adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa.
2. Investor Adalah pihak yang membeli saham, atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan menguntungkan.
3. Akuntan Publik Adalah pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi.

4. Karyawan Adalah pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan, oleh karena itu perlu laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
5. Bapepam Pihak yang megawasi perusahaan yang go public serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah layak atau tidak perusahaan itu go pulik.
6. Konsumen Pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut.
7. Pemasok Pihak yang menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan, sehingga perlu laporan keuangan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang di suplai.
8. Pemerintah Pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak.

Menurut Dwi Martani (2015) ia berpendapat bahwa pengguna laporan keuangan terdapat tujuh sebagai berikut ini ialah:

1. Investor
Investor sebagai pengguna berkepentingan untuk memberikan penilaian atas kepada sebuah perusahaan terhadap kemampuan membayar deviden di waktu yang akan datang, sehingga investor dapat memberi keputusan untuk menjual atau membeli saham perusahaan tersebut..
2. Karyawan
Karyawan sebagai pengguna Informasi laporan keuangan yang sangat bermanfaat untuk mereka agar dapat memberikan penilaian atas kemampuan atau kesanggupan perusahaan mengenai pemberian balas jasa, tunjangan, manfaat pensiun, dan lapangan pekerjaan.
3. Pemberi jaminan
Pemberi jaminan sebagai salah satu pengguna informasi laporan keuangan maka pemberi jaminan bisa menilai mampu atau tidaknya perusahaan membayar kewajiban dan bunga. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan dari pemberi jaminan, apakah akan memberi pinjaman atau malah sebaliknya.
4. Pelanggan
Bagi para pelanggan sebagai pengguna dapat menilai kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam

menjamin kelangsunga hidupnya dari informasi laporan keuangan yang disajikan.

5. Pemerintah

Pemerintah yang juga termasuk dalam pengguna laporan keuangan sebab dari informasi laporan keuangan yang disajikan pemerintah dapat menilai bagaimana alokasi sumberdaya yang mampu dilakukan oleh perusahaan.

3. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Sugiman (2018) desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa yang membantunya untuk mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Sugiman (2018) ia berpendapat bahwa pemerintah desa sebagai berikut :

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Pemerintah desa yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa guna mengurus dan mengatur kepentingan warga masyarakat setempat, yang berdasar asal-muasal dan adat istiadat yang diakui dan dihormati. Dalam upaya pembangunan nasional, desa memiliki peran yang sangat penting, dimana penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah-wilayah pedesaan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga- lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerinthan Desa., pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Fungsi dan Tugas Pemerintahan Desa

Menurut Sugiman (2018) pemerintah desa memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, dan lainnya.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan.
 - 3) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
 - 4) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 5) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, dan lainnya.

- b. Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - 2) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - 3) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - 4) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan.
- c. Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa serta kantor dan kebutuhan desa lainnya.
 - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan.
 - 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan.
- d. . Kepala seksi mempunyai fungsi:
 - 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- e. Kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

BUMDes banyak sekali tersebar diseluruh pelosok desa di Indonesia. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut ini pengertian BUMDes menurut beberapa para ahli.

Menurut Gusnardi (2019) ia mendefisikan BUMDes sebagai berikut :

BUMDes merupakan suatu badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa.

Menurut Nurhayati (2018) mendefisikan BUMDes sebagai berikut :

Badan usaha milik desa (BUMDES) Lahir dari suatu pedekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan potensi desa, pengelolaan bumdes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa.

BUMDes sebagai sebuah entitas diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP. BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Dengan kata lain, Bumdes adalah badan usaha yang seluruh kegiatannya dilakukan oleh desa serta sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Nurhayati (2018) pendirian BUMDes diharapkan selalu memberikan manfaat untuk masyarakat desa seperti :

- 1) Membuka lapangan pekerjaan
- 2) Mengelola sumber daya alam yang ada
- 3) Meningkatkan perekonomian desa.

Modal awal yang dimiliki BUMDes bersumber dari APB Desa dengan menggunakan dana APBD Provinsi sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah desa. Sebagai lembaga usaha desa, BUMDes dapat menjalankan beberapa bisnis usaha. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota. Permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

b. **Dasar Hukum BUMDES**

BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Landasan hukum pendirian BUMDes adalah UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Menurut Gusnardi (2019) landasan hukum pendirian BUMDes sebagai berikut

1. Pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1) yang berbunyi “*Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa*”.
2. PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 78

9. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
10. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan.
11. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Tabungan masyarakat

- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
 - a) Bentuk badan hukum
 - b) Kepengurusan
 - c) Hak dan kewajiban
 - d) Permodalan
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang mencakup beberapa hal, antara lain yaitu perkumpulan orang atau biasa disebut dengan organisasi, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, memiliki harta kekayaan tersendiri, mempunyai susunan kepengurusan, mempunyai hak dan kewajiban, dapat menggugat atau digugat di Pengadilan. Subjek hukum itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum yaitu manusia dan badan. Badan tersebut dapat memiliki

kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Badan tersebut dikatakan sebagai badan hukum, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.

c. Fungsi BUMDes

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, fungsi Bumdes sebagai berikut :

- 1) Sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.
- 2) Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.

d. Tujuan Bumdes

Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDPT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan.

- 2) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- 3) Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
- 4) Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.
- 5) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 6) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 7) Membuka lapangan kerja.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum.

Menurut Gusnardi (2018) yang menyatakan tujuan BUNDes sebagai berikut:

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- 4) Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal BUM Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa.

e. Manfaat BUMDES

Menurut Gusnardi (2018) BUMDes memiliki dua manfaat sebagai berikut :

a) Komersil

Manfaat komersil yakni sebagai lembaga komersil Bumdes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi .

b) Pelayanan publik

Manfaat publik yakni BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial seperti memberikan wawasan baru, serta mendorong pembangunan masyarakat desa melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan.

B. Penelitian Terdahulu

Dari peneliti sebelumnya masih banyak sekali ditemui permasalahan yang terjadi pada BUMDes yang belum melakukan penyajian laporan keuangan yang berdasar pada SAK ETAP yang berlaku umum. Hasil penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang sedang melakukan penelitian. Hasil penelitian ini nantinya akan ikut menentukan kualitas dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berikut ini kajian penelitian terdahulu :

1. Dian Saputra (2021), Meneliti Tentaang “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”. Variabel penelitian dalam penelitian ini yakni prinsip akuntansi, Proses Akuntansi dan BUMDes. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa proses akuntansi yang dilakukan oleh badan usaha milik desa (BUMDes) x belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum sebab bumdes tidak membuat jurnal, buku besar, buku pembantu, dan jurnal penyesuaian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yaitu metode penelitian yang digunakan dimana dalam penelitian terdahulu jenis data yang dipergunakan hanya menggunakan data primer. Sedangkan peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder.
2. I Gusti Ayu Astri Pramitari, Ketut Nurhayanti, Dan Si Luh Putu Yulita Suningsih (2020), yang berjudul “Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa

Pengelolaan Sampah BUMDes Desa Buduk”. Variabel penelitian dalam penelitian ini yakni akuntansi, BUMDes, laporan keuangan, standar akuntansi, dan SAK ETAP. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa BUMDes Desa Buduk telah menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban. Namun, Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengelola unit jasa pengelolaan sampah bumdes buduk belum disusun berdasarkan SAK ETAP sehingga laporan yang dihasilkan kurang informatif dan tidak dapat memberikan informasi yang sesungguhnya terkait kondisi keuangan entitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yaitu prosedur pengumpulan data yang dilakukan diawali dengan proses wawancara terlebih dahulu, sedangkan peneliti melakukan proses observasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara.

3. Firda Novianti Afkarina, Diah Probowulan, Astrid Maharani (2022), yang berjudul “Penerapan SAK ETAP Pada Bumdes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember “. Variabel penelitian dalam penelitian ini yakni akuntansi, SAK ETAP, dan BUMDes. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Laporan keuangan yang disusun BUMDes Arum Jaya Mandiri masih belum memenuhi pedoman SAK ETAP. Penyusunan laporan keuangan

yang seharusnya dibuat 5 komponen, namun BUMDes Arum Jaya Mandiri hanya mampu membuat 2 komponen laporan keuangan untuk per periode akuntansi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yaitu teknik analisis data yang dipergunakan adalah reduksi data, penyajian data, penerapan data, serta pengambilan keputusan. Sedangkan peneliti menggunakan teknik analisis data penyajian data, analisis data, membandingkan serta menyimpulkan data.

4. Hetika, Nurul Mahmudah (2017), yang berjudul “Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Sak Etap Pada Umkm Kota Tegal “. Variabel penelitian dalam penelitian ini yakni akuntansi, SAK ETAP, dan UMKM. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana dan para pelaku UMKM di Kota Tegal belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai SAK ETAP. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yaitu sample penelitian menggunakan purposive sample serta prosedur pengumpulan data menggunakan koesioner dan wawancara. Sedangkan penulis tidak menggunakan prosedur pengumpulan data melalui koesioner.

5. Devinta Indah Sari Sinaga , Nurlaila , Rahmat Daim Harahap (2022), yang berjudul “Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan “.Variabel penelitian dalam penelitian ini yakni laporan keuangan, SAK ETAP, dan BUMDes. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif . Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BUMDes di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi laporan keuangan yang dimiliki BUMDes di Kecamatan Pulo Bandring hanya terdiri dari pencatatan buku kas, neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDes Mandiri tidak menyusun laporan arus kas dan CALK serta tidak membuat laporan lengkap sesuai SAK ETAP. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yaitu dalam proses pengumpulan data yang dilakukan difokuskan pada proses pengembangan konsep, menghimpun fakta tanpa melakukan hipotesis. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang dilakukan peneliti masih dilengkapi dengan adanya bahan-bahan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik pembahasan guna memperoleh dasar teoritis.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil
1.	Dian Saputra (2021), Analisis Penerapan	Kualitatif Deskriptif	Proses akuntansi yang dilakukan oleh BUMDes X belum sesuai dengan

	Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu		prinsip akuntansi yang berterima umum sebab bumdes tidak membuat jurnal, buku besar, buku pembantu, dan jurnal penyesuaian. Sistem pencatatan yang diterapkan oleh pihak pengelola BUMDes X yaitu sistem pencatatan yan berbasis akrual (accrual basis).
2.	I Gusti Ayu Astri Pramitari, Ketut Nurhayanti, Dan Si Luh Putu Yulita Suningsih (2020), Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk	Kualitatif Deskriptif	Laporan yang dibuat oleh BUMDes Buduk yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca dan laporan modal belum disusun berdasarkan SAK ETAP sehingga laporan yang dihasilkan kurang informatif dan tidak dapat memberikan informasi yang sesungguhnya terkait kondisi laporan keuangan entitas.
3.	Firda Novianti Afkarina, Diyah Probowulan , Astrid Maharani (2022) Penerapan SAK ETAP Pada Bumdes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Kualitatif Deskriptif	Laporan keuangan yang disusun BUMDes Arum Jaya Mandiri masih belum memenuhi pedoman SAK ETAP. Penyusunan laporan keuangan yang seharusnya dibuat 5 komponen, namun BUMDes Arum Jaya Mandiri hanya mampu membuat 2 komponen laporan keuangan untuk per periode akuntansi.
4.	Hetika, , Nurul Mahmudah (2017), Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Sak Etap Pada Umkm Kota Tegal	Kualitatif Deskriptif	Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana dan para pelaku UMKM di Kota Tegal belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai SAK ETAP.
5.	Devinta Indah Sari Sinaga , Nurlaila , Rahmat Daim Harahap (2022) Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan	Kualitatif Deskriptif	BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi laporan keuangan yang dimiliki BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring hanya terdiri dari pencatatan buku kas, neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDesa Mandiri tidak menyusun laporan arus kas dan CALK serta tidak membuat laporan lengkap sesuai SAK ETAP;

Sumber : Dari Berbagai Jurnal

C. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017) yang mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli desa serta sebagai salah satu prasarana menjaga asset desa melalui pendapatan yang diperoleh. Salah satu BUMDes yang berkembang pesat sesuai dengan program unggulan pemerintah kabupaten Madiun yakni BUMDes Sumber Rejeki yang terletak di Desa Jiwan. Dimana BUMDes tersebut bergerak pada bidang kuliner serta jasa. Berdirinya suatu badan usaha tidak lepas dari kewajiban menyajikan laporan keuangan.

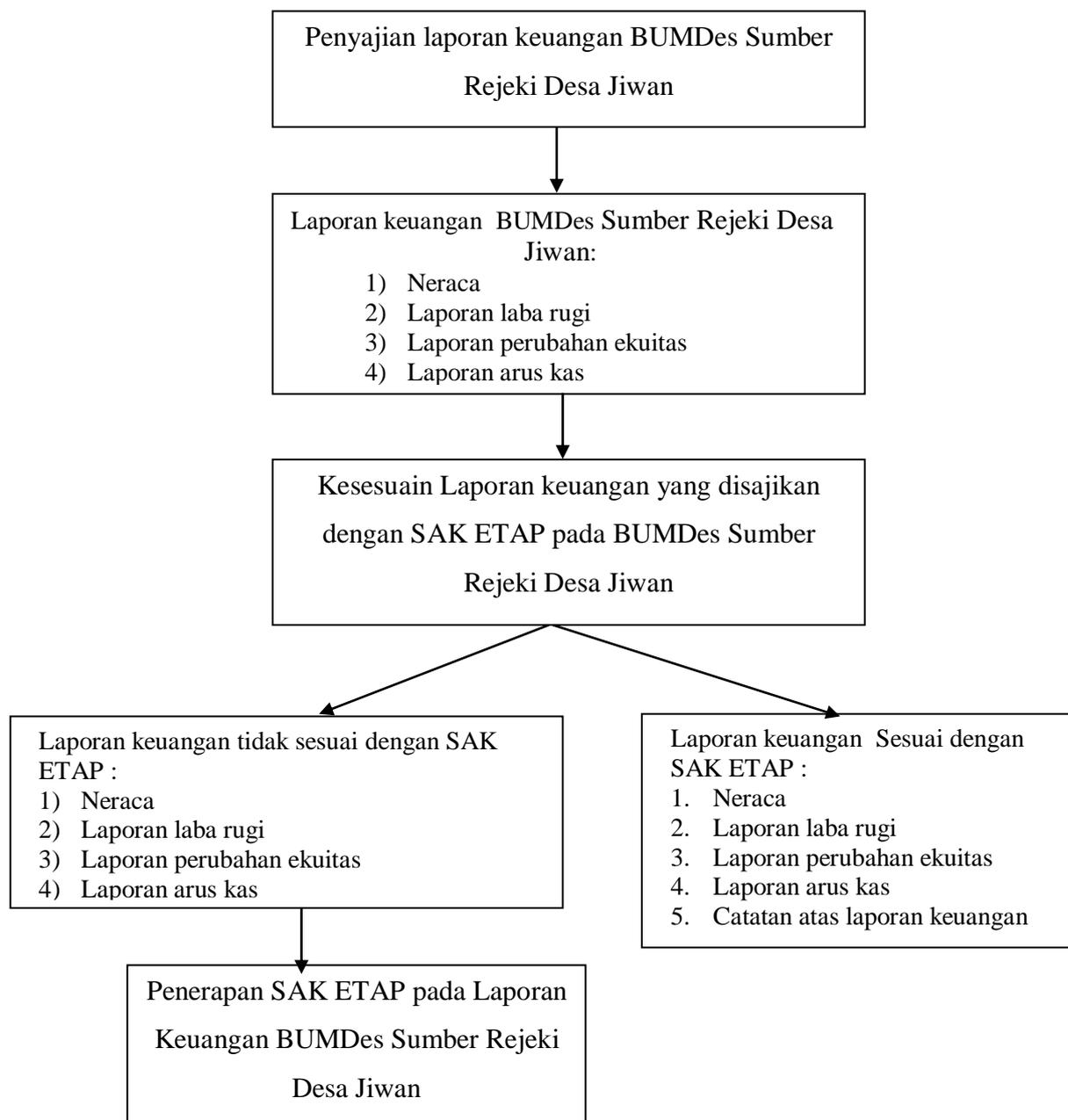
Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu badan usaha. Dengan menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dari informasi yang disajikan, sehingga informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lebih akurat dan dapat dipercaya. Penerapan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan dapat mengurangi terjadinya kesalahan saji material dalam laporan keuangan.

Kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan yang disajikan terjadi karena pengelola BUMDes kurang memahami bidang akuntansi dan masih menganggap bahwa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mudah. Kesesuaian penyajian laporan keuangan BUMDes yang belum

sesuai dengan SAK ETAP dan tidak ada dasar pedoman dalam penyusunan laporan keuangan serta perlu adanya pemahaman kepada pengelola BUMDes mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berpedoman atas SAK ETAP dalam BUMDes tersebut, agar laporan keuangan yang disajikan lebih relevan dan dapat diandalkan.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan pentingnya penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan BUMDes yang dilakukan oleh Hetika dan Nurul Mahmudah (2017), yang menyatakan bahwa Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana dan para pelaku UMKM di Kota Tegal belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan yang disusun.

Adapun bagan alur kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep